

**PENGUATAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

HEMAFITRIA

Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Pontianak Jl Ampera No. 88 Pontianak

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa. Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PKn perlu memperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*valuebased*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Terdapat 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi: tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dalam standar kompetensi kurikulum PKn, ditegaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Pengembangan pembelajaran PKn dalam membentuk karakter bangsa merupakan suatu bentuk pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang mendunia, yang dapat dijadikan tolak ukur dalam setiap langkah guna memperkokoh ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Karakter Bangsa, Kurikulum PKn, Pembelajaran PKn

PENDAHULUAN

Melemahnya karakter bangsa menjadi acaman bagi keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia. Hal ini menjadi perhatian semua komponen bangsa ini, hal yang tampak jelas dilihat adalah dengan maraknya isu dekadensi moral dalam tataran kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara. Perubahan struktur harus di barengi oleh pengembangan dunia pendidikan yang menghasilkan anak bangsa yang mampu mendobrak kesenjangan struktur sosial-ekonomi. Pendidikan harus mampu memecahkan isu strategis secara paradigmatis. Menurut BNSP (2010: 29-36) menyatakan Pendidikan harus mampu mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pengembangan karakter luhur serta pembangun tumbuhnya rasa kebangsaan warga negara.

Istilah karakter bangsa yang dalam literature Barat identik dengan “*National Character*” sangat erat terkait dengan masalah psikologi sosial. Beberapa ahli (Morgenthau, 1993; DeVos, 1968) mendefinisikan Karakter Bangsa dalam konteks Negara-bangsa (*National-State*) sebagai salah satu unsur kekuatan nasional (*national*

power) dalam politik antar bangsa, DeVos (1968: 14) mendefinisikan karakter bangsa sebagai berikut : *The term “national character” is used to describe the enduring personality characteristic and unique life style found among the polpulations of particular national states.* Karakter bangsa digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri kepribadian yang tetap dan gaya hidup yang khas yang ditemui pada penduduk Negara bangsa tertentu. Dengan demikian apabila merujuk dari apa yang uraikan diatas, maka kualitas sumber daya manusia yang akan mempengaruhi kualitas bangsa, salah satu faktor penentunya adalah sejauh mana kualitas pembentukan karakter bangsa itu dapat diwujudkan.

Karakter luhur dan kebangsaan warga negara di Indonesia perlu di kembangkan hal ini diwadhahi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Winataputra (2001: 45) menyatakan bahwa istilah Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti *“citizenship education”* atau *education for citizenship* yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal dan di luar sekolah baik yang berupa kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan YME.

Substansi dan tujuan PPKn menjadi permasalahan, hal ini terkesan kontradiktif antara yang dialami oleh siswa di lingkungan luar kelas dengan yang di terima didalam kelas. Materi PKn tidak selaras dengan kondisi riil yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga apa yang disampaikan oleh guru menjadi tidak bermakna bagi kehidupan siswa. Terdapatnya jarak, antara materi di kelas dengan kondisi realitas yang dialami siswa, menjadi pemicu munculnya persepsi, yang memberikan predikat bahwa PPKn merupakan mata pelajaran” bohong-bohongan”.

Berbagai kasus kenakalan remaja Indonesia, yang mengarah pada tindakan tidak terpuji, misalnya perkelahian, tawuran, kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya yang kesemuanya menjadi factor yang mendukung munculnya vonis terjadinya kegagalan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bertolak dari hal tersebut dirasakan penting untk melakukan revolusi dalam PPKn agar bias benar-benar berperan sebagai pendidikan karakter luhur dan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melalui penataan kurikulum

pendidikan guru PPKn. Tumbuhnya gagasan yang kuat untuk menempatkan PPKn sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan nilai dalam membentuk karakter bangsa. Dalam hal ini PPKn erat hubungannya dengan jatidiri. Jatidiri diadaptasi dari *characteristic*, yang dalam bahasa Inggris memiliki sinonim paling dekat dengan *individuality, specialty, attribute, feature, characte*. Istilah jatidiri ini dapat diartikan secara bebas sebagai ciri khas atau atribut. Jatidiri dimaksudkan sebagai ciri khas atau atribut konseptual dan empirik dari PPKn.

Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berahlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab. Secara teoritik Pendidikan Kewarganegaraan dirancang secara konfluen dan terintegrasi antara dimensi kognitif, afektif dan psikomotor dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara. Sedangkan secara pragmatik Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan memberikan penekanan pada isi yang memuat nilai nilai (*content embedding values*) dalam perilaku sehari-hari; (Budimansyah, Winata Putra, 2009: 38)

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu proses pendidikan kewarganegaraan perlu diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup : (1). Sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan; (2) pengalaman belajar atau kegiatan belajar; (3) program belajar (*plan for learning*) untuk siswa ; (4) hasil belajar yang diharapkan. Dari rumusan tersebut, kurikulum diartikan “ program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. (Nana Sudjana, 2010)

Oleh karena itu sudah seharusnya kurikulum PPKn memberikan perhatiannya yang lebih besar terhadap pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan masa sebelumnya. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah/mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan.

Atas pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis muatan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan memfokuskan pada “Penguatan Karakter Bangsa melalui Pengembangan kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”.

METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan artikel ini yakni kajian pustaka dan deskriptif. Kajian pustaka melalui pengembangan kurikulum PKn sebelumnya, sehingga untuk mengeksplorasi tema ini penulis banyak menggunakan referensi yang berkaitan dengan tema tersebut. Referensi tersebut berupa Permendiknas, makalah-makalah/materi sosialisasi kurikulum PKn, Literatur PKn berupa bahan ajar, dengan kaidah metodologis berupa keterkaitan interpretasi, induksi dan deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigm sebagai berikut. *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi.

Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai,

konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007).

Jika memperhatikan uraian tersebut, maka tampak bahwa PKn merupakan program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa. Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PKn perlu memperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*valuebased*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para siswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psikopedagogis-konstruktif.

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan karakter bangsa diarahkan sebagai upaya pengembangan warganegara melalui pendidikan kewarganegaraan. Mengutip pendapat Branson (1998) maka konstruk karakteristik warga negara dimaksud adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diformulasikan ke dalam tiga komponen penting, yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Sebagai realisasinya, salah satu alternatif pelaksanaan kebijakan yang bisa ditempuh adalah melalui pengembangan praksis pendidikan melalui model pembelajaran PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter di sekolah dan sebagai pusat praksis pendidikan (*eduentrum*) manusia seutuhnya. Pendidikan karakter warga negara merupakan praksis pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif, bebas dan bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi dirinya sehingga menjadi pribadi berakhlak mulia, menjadi manusia seutuhnya dalam totalitasnya sebagai manusia.

Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Wesley (2011:3) menyatakan *Curriculum is about taking a subject, preparing it for classroom use, and following through so that it makes a lasting impact on students*. Jelas bahwa Kurikulum adalah tentang menentukan subjek, mempersiapkan untuk penggunaan di dalam kelas, dan menindaklanjuti sehingga membuat dampak yang

langgeng pada siswa. Oleh karena itu proses pembelajaran harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum. Dalam pengembangannya, kurikulum melibatkan berbagai pihak, terutama pihak – pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan dengan keberadaan pendidikan yang dirancang, yaitu mulai dari ahli pendidikan, ahli bidang studi, guru, siswa, pejabat pendidikan, para praktisi maupun tokoh panutan atau anggota masyarakat yang lainnya.

Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Ada 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi: tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Ke 4 bagian/komponen penting kurikulum ini saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai perilaku yang diinginkan/dicita-citakan oleh tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih isi/materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan serta bentuk dan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum.

Prinsip pengembangan kurikulum Prinsip -prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum :

- a) Prinsip relevansi adalah kedekatan hubungan. Apabila dikaitkan dengan pendidikan dengan masyarakat maka harus memiliki keterkaitan yang erat sehingga hasil pendidikan yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan peserta didik di masyarakat.
- b) Prinsip fleksibilitas, Kurikulum yang dikembangkan harus memiliki ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Dalam hal ini berkaitan dengan fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pembelajaran.
- c) Prinsip efisiensi, Prinsip ini terkait dengan usaha, biaya, waktu dan tenaga yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat membuahkan proses dan hasil belajar yang optimal.
- d) Prinsip efektivitas adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas kurikulum berkaitan dengan proses mengajar pendidik, dan proses belajar peserta didik.
- e) Prinsip kesinambungan, prinsip ini dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan, jenis dan program pendidikan serta bidang studi.
- f) Prinsip berorientasi tujuan; Prinsip menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum.

Langkah pengembangan kurikulum selanjutnya setelah seperangkat kebutuhan tersusun adalah perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta pengembangan alat evaluasi. keberadaan PKN dari awal Indonesia merdeka sampai saat ini tidak lepas dari perkembangan kurikulum di Indonesia yang penulis dapatkan dari berbagai sumber dapat dipaparkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum dari waktu ke waktu

Kurun Waktu	Nama Kurikulum	Istilah untuk PKN dlm Struktur Kurikulum	Keterangan
Kurun waktu 1945-1968, 1947, 1952, 1964, 1968)			
Tahun 1947	Rencana Pelajaran	Belum ada istilah khusus	Pendidikan lebih menekankan pd pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain di muka bumi.
Tahun 1952	Rencana Pelajaran Terurai	Civic/Kewargaan Negara	Isi Civic: Pancasila, UUD, Tap MPR, PBB
Tahun 1964	Rencana Pendidikan 1964/ Kurikulum 1964	Pengembangan Moral	Untuk pembekalan jenjang SD, termasuk program Pancawardhana yang dijadikan sebagai pusat
Tahun 1968	Kurikulum 1968 Sekolah Dasar	Pendidikan Kewargaan Negara (PKN)	Tujuan PKN untuk membina/ menanamkan, mengembangkan dan memelihara jiwa dan moral yang baik berdasarkan Pancasila
Kurun waktu 1968-1999 (Th 1975, 1984, 1994)			
Tahun 1975	Kurikulum 1975 Sekolah Dasar	Pendidikan Moral Pancasila (PMP)	Berdasarkan Tap IV/MPR/1973 mengamanatkan kurikulum di semua tingkat pendidikan harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP)
Tahun 1984	Kurikulum 1984	Pendidikan Moral Pancasila bermuatan P-4 (PMP/P-4)	Berdasarkan Tap II/MPR/1978 diadakan reorganisasi PMP disesuaikan P-4. Berdasarkan Tap IV/Mampak PR/1978, PMP yang disesuaikan P-4 menjadi isi kurikulum di semua tingkat pendidikan, dengan alokasi waktu 2 jam/minggu

Tahun 1994	Kurikulum 1994	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	Berdasarkan UU No 2 th 1989 mengamanatkan bahwa isi kurikulum di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan Pancasila; (b) pendidikan agama; (c) pendidikan kewarganegaraan. Alokasi waktu 2 jam/minggu
Kurun waktu 1968-1999 (Th 2004, 2006, 2013)			
Tahun 2004	Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Kewarganegaraan (Kn) (Istilah yg digunakan di SD (PKnPS), SMP (Kn) dan SMA (PKn))	Berdasarkan UU No 20 th 2003 ditetapkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi wajib memuat antara lain Pendidikan Kewarganegaraan. Alokasi waktu 2 jam/minggu
Tahun 2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	Dasar UU no 20 th 2003. Istilah yg digunakan di SD, SMP, SMA sama, yaitu PKn. Alokasi waktu: 2 jam/minggu
Tahun 2013	Kurikulum 2013	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	PPKn tercantum dalam struktur kurikulum SD, SMP dan SMA. Alokasi waktu untuk SD 5 jam (kl 1 SD); 6 jam (kl 2,3) dan 4 jam/mg (kl 4,5,6). Sedang alokasi waktu untuk SMP kl 7,8,9 setiap semester 3 jam/minggu. Alokasi waktu untuk SMA kelas 10, 11, dan 12, setiap semester 2 jam/ minggu.

Strategi Pengembangan PKn Dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Atau dengan perkataan lain merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara *konseptualepistemologis*, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledgesystem* (Hartonian: 1996, Winataputra:2001) yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "*civic intelligence*" dan "*civic participation*" serta "*civic responsibility*" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang berPancasila (Winataputra, 2001, 2006).

Makna Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa perlu dilihat dalam tiga tataran, yakni: pendidikan Pancasila sebagai kemasinan kurikuler (mata pelajaran atau mata kuliah), sebagai proses pendidikan (praksis

pembelajaran), dan sebagai upaya sistemik membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan (proses *nation's character building*).

Pendidikan Pancasila sebagai upaya sistemik membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan: *Proses nation's character building*. Untuk membangun kehidupan berdemokrasi konstitusional yang berdasarkan Pancasila itu tidaklah semudah yang diduga kebanyakan orang, karena memang kehidupan demokrasi konstitusional tidak bisa dibangun seketika atau dalam waktu singkat. Sangat banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu negara. Bahmuller (1996: 216-221) mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu: “...*the degree of economic development; ...a sense of national identity; ...historical experience and elements of civic culture.*” Tingkat perkembangan ekonomi, kesadaran identitas nasional, dan pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “*civic virtue*” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani-Pancasila bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan yang berPancasila (*civic culture*). Oleh karena itu diperlukan adanya dan berperannya pendidikan pancasila yang menghasilkan demokrasi konstitusional yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan Pancasila. Dalam waktu bersamaan proses pendidikan tersebut harus mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya Pancasila yang menjadi inti dari masyarakat madani-pancasila yang demokratis. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan Pancasila untuk membangun demokrasi konstitusional di Indonesia.

Pengembangan Proses Pembelajaran

Jika dianalisis Kompetensi Dasar PPKn 2013 jenjang SD, SMP, dan SMA, maka guru PPKn dituntut untuk mampu mengembangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum tentang skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa, dalam rangka mencapai suatu

tujuan pembelajaran. Model pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua. Pertama pendekatan pembelajaran berpusat kepada guru (*teacher centered*), dan kedua pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa (*student centered*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka guru PPKn dituntut untuk mampu mengembangkan proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru PPKn harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lapangan. Mengaitkan antara teori dengan praktek, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah.

Alternatif metode yang cocok untuk mewujudkan hal tersebut di atas, guru PPKn bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, observasi, simulasi, inquiry, bermain peran, studi kasus, kunjungan lapangan, penugasan, proyek, debat, portofolio, atau metode lainnya yang dinilai relevan. Apapun metode yang digunakan, yang penting bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan warga negara serta internalisasi karakter kewarganegaraan kepada peserta didik.

Arah strategi Pengembangan Pembelajaran PKN

Pengembangan pembelajaran PKN dalam membentuk karakter bangsa merupakan suatu bentuk pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang mendasar, yang dapat dijadikan tolak ukur dalam setiap langkah guna memperkokoh ideologi Negara kesatuan Republik Indonesia strategi pengembangan ini meliputi:

1. Materi pelajaran

Berkaitan dengan permasalahan materi pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2004 telah mengalami perubahan yang sangat besar, dari pengembangan materi dalam kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum 2004 pengembangan materi PKN, baik untuk jenjang SMP maupun SMA lebih bercirikan keilmuan. Hal ini tidak terlepas dari adanya karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dengan paradigma baru, yaitu bahwa PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui *Civic Intelligence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial; *Civic Responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan *Civic Participation*, yaitu kemampuan

berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan.

2. Nilai, Moral, dan Norma dalam Materi PKn

Kompetensi penguasaan bahan ajar dalam PKn mencakup 3 aspek, yaitu memahami Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), memahami Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*), dan memahami Etika Kewarganegaraan (*Civic Ethic*). Modul ini ditujukan untuk mengembangkan kompetensi penguasaan bahan ajar, pada aspek kompetensi tentang pemahaman Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) khusus pada subkompetensi pemahaman nilai, norma dan moral.

3. Metode Pendidikan Kewarganegaraan

Ciri utama PKn tidak lagi menekankan pada mengajar tentang PKn tetapi lebih berorientasi pada membelajarkan PKn atau pada upaya-upaya guru untuk ber-PKn atau melaksanakan PKn. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan metode pembelajaran PKn yang efektif, tepat, menarik, dan menyenangkan untuk membelajarkan PKn tersebut. Penguasaan metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki seorang guru. Kemampuan dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa baik keberhasilan aspek kognitif maupun aspek afektif dan psikomotor. Ketidaktepatan memilih dan menggunakan metode pembelajaran akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut rambu-rambu pembelajaran PKn dalam Kurikulum 2004, ditegaskan bahwa pembelajaran dalam mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya membelajarkan dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual (CTL) untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga Negara Indonesia. *Contextual Teaching and Learning* (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat 6 komponen CTL, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya.

Dalam PKn dikenal suatu model pembelajaran, yaitu model VCT (*Value Clarification Technique*/Teknik Pengungkapan Nilai), yaitu suatu teknik belajar-mengajar yang membina sikap atau nilai moral (aspek afektif). VCT dianggap cocok digunakan dalam pembelajaran PKn yang mengutamakan pembinaan aspek afektif. Pola pembelajaran VCT dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena pertama, mampu

membina dan mempribadikan (personalisasi) nilai-moral. Kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dalam kehidupan nyata. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi afektualnya. Kelima, mampu memberikan pengalaman belajar berbagai nilai-moral yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang. Keenam, menuntun dan memotivasi hidup layak dan bermoral tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu PKn merupakan program pendidikan yang sangat penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa. Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PKn perlu memperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*valuebased*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para siswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif.

Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Ada 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi: tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Ke 4 bagian/komponen penting kurikulum ini saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai perilaku yang diinginkan/dicita-citakan oleh tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih isi/materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan serta bentuk dan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum.

Dalam standar kompetensi kurikulum PKn, ditegaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Pengembangan pembelajaran PKn dalam membentuk karakter bangsa merupakan suatu bentuk pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang mendunia, yang dapat dijadikan tolak ukur dalam setiap langkah guna memperkokoh ideologi Negara kesatuan Republik Indonesia strategi ini meliputi:

Lingkup Materi PKn, Nilai, Moral, dan Norma dalam Materi PKn, Metode dan Media Pendidikan Kewarganegaraan .

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BNSP
- Bahmueller, C. F. 1997. A Framework For Teaching Democratic Citizenship : An International Project *In The International Journal of Social Education*, 12,2
- Branson, M.S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Cogan, J.J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Cogan, J.J. 1999. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia . 2003. *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Devos, George A. 1968. National Character. Dalam Sills, David L. (editor). *International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: *The McMillan Company and the Free Press*, V.11 &12, hal.14-19.
- Muhammad Nuh, 2013. *Pengembangan Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Nana Sudjana 2010. *Dasar-dasar Proses Belajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas No 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Somantri, Nu'man. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung PPS-FPIPS UPI dan PT. Remaja Rosda Karya.
- Sapriya dan Winataputra. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS –UPI.
- Sapriya & Winataputra, Udin.S. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan : Model pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS-UPI
- Suriakusumah.1992.Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan dan Masalah Warga negara. Bandung: FIPS IKIP.

- Suyitno, A. 1983. *Konsep Pendidikan Moral Pancasila sebagai Pendidikan Nilai-Nilai*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Alfabeta, Bandung.
- Wasley Null, 1973. *Curriculum: from theory to practice*. British Librery Cataloguing in publication information Avilable.
- William F. Pinar. *International HandBook of Curriculum Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra dan Budimansyah, 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.
- Winataputra, U.S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi PPS UPI: tidakditerbitkan.